

"Tema: 6 (Rekayasa sosial dan pengembangan perdesaan)"

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT JAWA BAGELEN

**(Studi Mengenai Potret Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten
Kebumen dan Kabupaten Purworejo di Akhir Program MDGs)**

Oleh

Soetji Lestari¹, Sofa Marwah² dan Tri Rini Widyastuti¹

¹FISIP Unsoed/Jurusan Sosiologi – Kampus Unsoed Grendeng Purwokerto

²FISIP Unsoed/Jurusan Ilmu Politik – Kampus Unsoed Grendeng Purwokerto

Email: soetjilestari123@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi politik perempuan dalam masyarakat Jawa Bagelen yang berada di wilayah Kabupaten Purworejo dan Kebumen. Kajian didasarkan pada data sekunder yang bersumber dari Laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2016 yang diterbitkan oleh BPS dan KPPPA, serta Kabupaten Purworejo dalam Angka dan Kabupaten Kebumen dalam Angka. Untuk melihat hasil capaian partisipasi politik perempuan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen dibandingkan dengan data yang ada di lingkup regional (Jawa Tengah) dan nasional (Indonesia). Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa walaupun Purworejo dan Kebumen berada dalam kultur yang relatif sama yaitu Jawa Bagelen, namun kondisi sosial ekonomi antar kedua wilayah tersebut relatif berbeda. Kabupaten Kebumen dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di lingkup Jawa Tengah, namun secara kuantitas memiliki tingkat partisipasi politik perempuan yang cukup tinggi baik secara regional maupun nasional. Hal ini menjadi sebuah kajian menarik mengingat partisipasi politik perempuan yakni perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif secara global juga rendah, Indonesia 19,80 persen, Asean 18,20 persen, Asia 19,70 persen, dan dunia 23,60 persen. Secara kualitatif Kebumen juga pernah memiliki kepala daerah perempuan yang berhasil naik jenjang kariernya sampai ke level provinsi.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Perempuan, Kesetaraan Gender

ABSTRACT

This paper aims to examine women's political participation in the Bagelen Javanese community in the Purworejo and Kebumen Regencies. The study is based on secondary data derived from the 2016 Gender-Based Human Development Report published by BPS and KPPPA, and Purworejo District in Figures and Kebumen District in Figures. To see the results of political achievements in Purworejo and Kebumen districts compared to data in the regions (Central Java) and national (Indonesia). The results of this study indicate that there are Purworejo and Kebumen in a relatively similar culture, namely Java Bagelen, but the same social and economic issues. Kebumen District with a high level

of poverty in Central Java, but also has a very high level of participation both regionally and nationally. This is one thing that is attractive to women who are globally affiliated, Indonesia is 19.80 percent, ASEAN is 18.20 percent, Asia is 19.70 percent, and the world is 23.60 percent. Kebumen electronically also had regional heads who succeeded in climbing their careers to the provincial level.

Keywords: Politic Participation, Women, Gender Equality

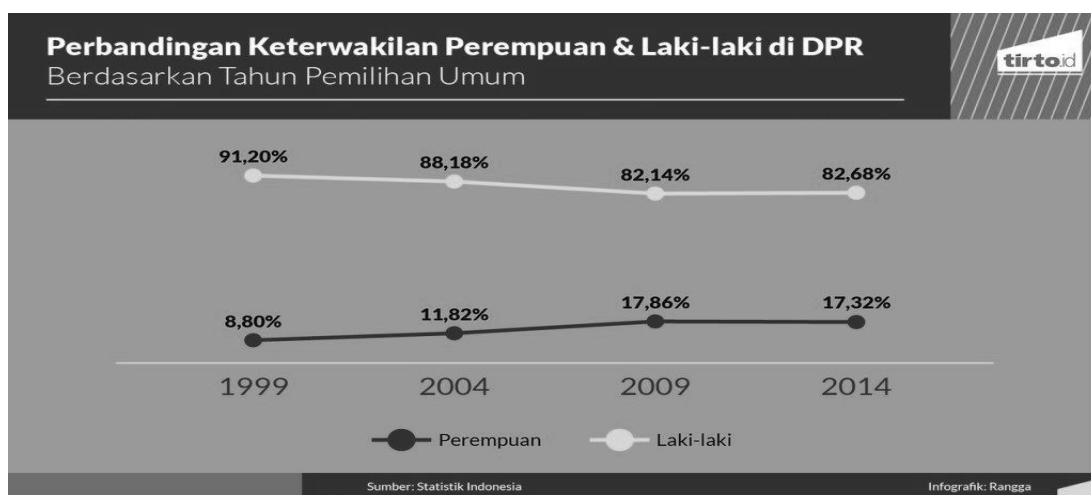
PENDAHULUAN

Ketimpangan gender masih menjadi isu ketimpangan global, termasuk Indonesia, sehingga telah menjadi komitmen dunia (yang diprakarsai oleh badan dunia PBB/UNDP) untuk memperkenalkan konsep pembangunan yang responsif gender. Konsep yang dimaksud adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 1995-an. Konsep ini dipertegas dengan dideklarasikannya *Millenium Development Goals* (MDGs) dimana salah satu tujuannya adalah mendorong tercapainya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada tahun 2015. Sebagaimana dijelaskan oleh Pemerintah (melalui Badan Pembangunan Nasional/Bappenas), keikutsertaan Indonesia dalam menyepakati Deklarasi MDGs bersama dengan 189 negara lain pada tahun 2000 bukan semata-mata untuk memenuhi tujuan dan sasaran *Millenium Development Goals* (MDGs), namun keikutsertaan itu ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tujuan dan sasaran MDGs sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Indonesia (Bappenas, 2011).

Salah satu indikator penting untuk melihat pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender adalah partisipasi politik perempuan. Secara lebih spesifik partisipasi politik perempuan tersebut diukur melalui persentase perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif di suatu wilayah. Memang harus diakui persentase perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif bukan satu-satunya ukuran yang ideal untuk mengukur tingkat partisipasi politik perempuan. Di satu sisi meskipun bukan satu-satunya ukuran untuk melihat tingkat partisipasi politik perempuan, namun persentase perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif telah menjadi salah satu ukuran Indeks Pemberdayaan Gender. Di Indonesia semangat untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam politik telah diatur Undang-undang Pemilu No. 12 tahun 2004 pasal 65 (ayat 1) yang berbunyi:

“Setiap partai politik dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen”

Undang-undang ini didasarkan pada kenyataan bahwa selama ini peran perempuan dalam dunia politik masih sangat rendah, tidak seimbang dengan jumlah sumber daya manusia perempuan yang mencapai sekitar 50 persen, sehingga dikhawatirkan kepentingan perempuan banyak yang terabaikan. Sejak diberlakukan *affirmative action* tersebut, kuota 30 persen belum pernah tercapai namun terdapat *trend* peningkatan sebagaimana terlihat dalam gambar 1 di bawah.



Gambar 1. Perbandingan Keterwakilan Perempuan dan Laki-laki di DPR, Th. 1999-2014 (Sumber: <https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belum-pernah-tercapai-cv8q>).

Rendahnya partisipasi politik perempuan tersebut dikhawatirkan baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap upaya pemberdayaan perempuan dalam arti luas (Mukarom, 2008). Di satu sisi tingkat partisipasi politik perempuan antar daerah/wilayah adalah sangat yang dipengaruhi oleh banyak faktor.

Makalah ini berupaya untuk melihat capaian partisipasi politik perempuan Jawa yang berada dalam sub kultur Bagelen, yang berada wilayah administratif Kabupaten Purworejo dan Kebumen. Kajian mengenai posisi perempuan dalam tradisi Bagelen penting kaitannya untuk melihat perkembangan sosial-politik wilayah tersebut. Hal lain didasarkan masih terbatasnya studi yang mengkaji posisi *indigenous* perempuan dalam

budaya pinggiran, di luar *negarigung*. Seperti diketahui Koentjaraningrat membagi variasi budaya Jawa, yaitu; 1) *negarigung* (Yogyakarta dan Solo); 2) Banyumas dan Bagelen (Jateng barat daya); 3) *peisir* (Indramayu-Cirebon-Gresik); 4) *mancanegari* (Kediri dan Madiun); 5) *pinggir reksa* (Surabaya dan Malang). Koentjaraningrat (1984) menyatakan bahwa Bagelen dan Banyumas merupakan dua sub-daerah budaya di Jateng barat daya.

METODE PENELITIAN

Kajian mengenai Partisipasi Politik Perempuan di Kabupaten Kebumen dan Purworejo ini didasarkan pada analisis data sekunder yaitu yang bersumber pada buku *Pembangunan Manusia Berbasis Gender (PMBG) Tahun 2016* yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam buku tersebut berisi data tahun 2015. Tahun 2015 dipilih sebagai bahan analisis karena sebagai tahun akhir target capaian MDGs yang antara lain tujuannya adalah capaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Untuk melihat hasil capaian partisipasi politik pada dua Kabupaten tersebut digunakan analisis komparasi dengan menggunakan hasil capaian di tingkat provinsi Jawa Tengah dan nasional dengan sumber data yang sama, sehingga memiliki nilai komparatif. Data juga ditunjang data dari KPU Provinsi Jawa Tengah maupun Purworejo dalam Angka (tahun 2018) dan Kebumen dalam Angka (2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas Mengenai Masyarakat Bagelen

Kajian ini mengambil setting lokasi budaya Bagelen yang berada di wilayah Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen. Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen adalah termasuk dari 29 Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di sepanjang jalur selatan Pulau Jawa. Kedua kabupaten tersebut saling berdampingan, di mana Kabupaten Purworejo di sebelah timur dan Kabupaten Kebumen di sebelah barat. Sebagaimana terlihat dalam peta di bawah, bagian selatan kedua kabupaten tersebut adalah Samudera Hindia, tidak heran kalau wilayah tersebut memiliki banyak obyek wisata pantai dan keindahan laut.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada dua wilayah tersebut, pada tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Purworejo adalah 714.574 jiwa (50,68 persen

diantaranya adalah perempuan) dan jumlah penduduk Kabupaten Kebumen adalah 1.191.007 jiwa (50,21 persen diantaranya adalah perempuan). Di sini terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak. Penduduk di Kabupaten Purworejo dan Kebumen termasuk memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Sebagaimana diketahui tingkat kemiskinan di Jawa Tengah adalah 13,01 persen dengan garis kemiskinan Rp. 333.224,00. Sementara Purworejo dengan garis kemiskinan yang lebih rendah dari Jawa Tengah yaitu Rp. 325.871 memiliki tingkat kemiskinan 13,81 persen. Sementara Kebumen memiliki tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi yakni 19,60 persen (dengan garis kemiskinan Rp. 325.819). Tingkat kemiskinan di Kebumen ini tertinggi kedua di Jawa Tengah setelah Wonosobo (20,32 persen).

Profil SDM yang Berbasis Gender

Sampai saat ini pembangunan masih menunjukkan adanya ketimpangan gender, sehingga perlunya komitmen untuk melakukan kesetaraan dan pemberdayaan gender dalam berbagai bidang pembangunan. Hal ini terkait upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dimana jumlah SDM perempuan cukup besar namun secara kualitas masih banyak tertinggal; sekaligus untuk mendukung mewujudkan komitmen Internasional menuju Kesetaraan Gender 50:50 pada tahun 2030.

Di Indonesia isu pengarusutamaan gender juga tertuang dalam visi pembangunan nasional melalui penghapusan diskriminasi gender. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencantumkan sasaran pembangunan perspektif gender yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik di level pusat maupun daerah.

Untuk mengevaluasi bagaimana pembangunan berpersktif gender antara lain dengan melihat kondisi kualitas SDM secara umum dan kualitas SDM perempuan secara khusus yakni melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPM menggambarkan diukur melalui beberapa indikator yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan. Indikator-indikator ini menggambarkan kebutuhan dasar manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Sementara IPG menggambarkan selisih antara IPM laki-laki dan IPM perempuan. Untuk IDG tidak lagi mengukur pada kebutuhan

dasar melainkan pada pemberdayaan perempuan dan pengembangan eksistensinya sebagai manusia yang perlu untuk mengaktualisasikan diri.

Dalam laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2016 yang diterbitkan KPPPA, disebutkan bahwa berdasarkan laporan Human Development Report (HDR) tahun 2015, IPM Indonesia berada pada level sedang (UNDP: *Medium Development Index*) dengan capaian IPM sebesar 68,38, atau berada di peringkat 110 dari 188 negara dan berada di bawah rata-rata dunia (71,05). Dibandingkan negara-negara tetangga yang tergabung dalam ASEAN, Indonesia hanya menempati peringkat kelima dari sepuluh negara. Meskipun demikian, dari sisi kecepatan pertumbuhan IPM, Indonesia termasuk dalam *World's Top Movers in HDI Improvement* untuk periode tahun 1970-2010 (Lestari, 2017).

Sebagaimana terlihat dalam Tabel di bawah, berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan KPPPA dan BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Purworejo adalah tinggi, baik dilihat dari tingkat regional maupun tingkat nasional. Sebaliknya IPM Kabupaten Kebumen berada di level bawah regional maupun nasional. Hal ini bisa dipahami mengingat Kebumen memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi.

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Purworejo dan Kebumen, Thn. 2015

Wilayah	AHH (Tahun)		HLS (%)		Rata-2 Lama Sekolah		Pengeluaran		IPM	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Kebumen	72,67	72,77	12,07	12,49	6,75	7,04	7.755	8.008	65,67	66,87
Purworejo	73,83	74,03	13,03	13,04	7,63	7,65	9.189	9.305	70,12	70,37
Jawa Tengah	73,88	73,96	12,17	12,38	6,93	7,03	9.640	9.930	68,78	69,49
Indonesia	70,59	70,78	12,39	12,55	7,73	7,84	9.903	10.150	68,9	69,55

Sumber ; KPPPA dan BPS (2016)

IPG adalah merupakan IPM yang memperhatikan selisih capaian IPM antara laki-laki dan perempuan. IPM selama ini dianggap kurang sensitif gender, karena pada kenyataannya ada perbedaan kualitas SDM laki-laki dan perempuan yang cukup menyolok. *Gender-related Development Index* (GDI) adalah merupakan ukuran kualitas SDM yang memperhatikan selisih perbedaan laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain sama dengan IPM, GDI atau Indeks Pembangunan Gender (IPG) juga mengukur kapabilitas dasar manusia pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dengan fokus pada ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tabel di bawah menggambarkan

trend GDI/IPG di Kabupaten Purworejo dan Kebumen dalam konteks regional (Jawa Tengah) dan nasional (Indonesia) sehingga dapat dilihat bagaimana capaian masing-masing wilayah.

Tabel 2. Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Purworejo dan Kebumen Tahun 2015

Wilayah	AHH		HLS		RLS		PPD		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Kebumen	70,80	74,62	12,02	12,81	7,67	6,45	10.462	7.596	70,19	65,62	93,48
Purworejo	72,03	75,90	13,59	12,55	8,40	7,16	10.272	9.247	73,15	68,89	94,17
Jawa Tengah	72,05	75,95	12,29	12,47	7,59	6,50	13.469	9.001	73,39	67,67	92,21
Indonesia	68,93	72,78	12,42	12,68	8,35	7,35	14.163	8.464	73,58	66,98	91,03

Sumber : KPPPA dan BPS (2016)

Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk IPG Kabupaten Kebumen adalah di atas IPG Provinsi Jawa Tengah dan IPG nasional. Dalam hal ini, IPG Kabupaten Kebumen adalah 93,48 dan IPG Provinsi Jawa Tengah 92,21 dan IPG nasional adalah 91,03. Tentu saja kondisi tersebut cukup menggembirakan karena menunjukkan bahwa pembangunan gender di daerah tersebut cukup berhasil karena menunjukkan adanya akses, kontrol dan manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki terhadap hasil-hasil pembangunan. Kondisi yang relatif sama juga nampak dalam pembangunan gender di Kabupaten Purworejo yang berada di atas IPG Provinsi Jawa Tengah dan IPG nasional. IPG Kabupaten Purworejo adalah 94,17, sedangkan IPG Provinsi Jawa Tengah adalah 92,21 dan IPG nasional adalah 91,03.

Tingkat Partisipasi Politik Perempuan

IPM dan IPG adalah merupakan ukuran yang menyangkut kebutuhan/kualitas dasar manusia (pendidikan, kesehatan dan ekonomi). Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau Gender Empowering Measurement adalah merupakan indikator yang lebih maju lagi karena lebih melihat pada pemberdayaan perempuan, yakni dengan cara melihat peranan/ partisipasi dalam bidang politik, ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Dimensi Partisipasi Politik menggunakan indikator proporsi (keterwakilan) perempuan dan laki-laki di Parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD); Dimensi Partisipasi Ekonomi dan Pengambilan Keputusan menggunakan indikator proporsi perempuan dan laki-laki yang bekerja sebagai profesional, teknisi, pimpinan dan tenaga ketatalaksanaan; Dimensi

Penguasaan Sumber Daya Ekonomi menggunakan indikator perkiraan penghasilan perempuan dan laki-laki (KPPPA dan BPS 2012).

Data di bawah menggambarkan IDG Kabupaten Purworejo dan Kebumen di akhir tahun target capaian MDGs tahun 2015.

Tabel 3. Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Purworejo dan Kebumen Tahun 2015

Wilayah	Keterlibatan Pr dlm Parlemen	Perempuan sbg Manager	Sumbangan Pendapatan Pr	IDG
Kebumen	26,00	50,93	25,10	68,76
Purworejo	17,78	45,20	33,92	68,74
Jawa Tengah	24,24	47,72	34,06	74,80
Indonesia	17,32	46,03	36,03	70,83

Sumber : KPPPA dan BPS (2016)

Adapun dalam lingkungan politik dan pemerintahan, keterwakilan perempuan di lingkungan DPRD Kabupaten Kebumen dan DPRD Kabupaten Purworejo belum menunjukkan hal yang menggembirakan. Setidaknya hal tersebut jika dikaitkan dengan pemberlakuan kuota 30 persen perempuan dalam lingkungan lembaga legislatif. Dalam hal ini, di DPRD Kabupaten Purworejo keterwakilan politik perempuan hanya 17,78 persen dan di DPRD Kabupaten Kebumen sebanyak 28 persen. Khusus di Kabupaten Kebumen, proporsi tersebut menggembirakan karena mendekati minimal kuota 30 persen perempuan di lembaga legislatif. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding dengan angka nasional yang hanya 17,32 persen.

Jika dilihat dari masing-masing fraksi partai politik pengusung, di DPRD Kabupaten Purworejo rata-rata hanya 1 anggota dewan perempuan. Itu pun tidak semua partai memiliki anggota dewan perempuan, seperti PDI-P, PAN dan Nasdem. Hanya Gerindra yang memiliki anggota dewan perempuan sebanyak 2 orang.

Tabel 4. Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purworejo dan Kebumen, Tahun 2018

Partai	Purworejo			Kebumen		
	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr
PDI - P	8	-	8	6	3	9
Golkar	6	1	7	3	2	5
PKB	5	1	6	6	-	6

PAN	1	-	1	6	1	7	
PPP	1	1	2	3	-	3	
PKS	3	1	4	-	3	3	
Demokrat	5	1	6	3	1	4	
Gerindra	4	2	6	5	2	7	
Hanura	2	1	3	1	-	1	
Nasdem	2	-	2	3	2	5	
Jumlah	37	8	45	36	14	50	
Persentase	(82,22)	(17,78)	(100,00)	(72,00)	(28,00)	(100,00)	
Jumlah	Calon	222	130	352	194	133	327
Anggota	DPRD						
Kab/Kota							
Persentase		(63,07)	(36,93)	(100,00)	(59,33)	(40,67)	(100,00)

Sumber: Purworejo dalam Angka 2018 dan Kebumen dalam Angka 2018 yang diolah
 Selanjutnya di DPRD Kabupaten Kebumen, kondisinya lebih menggembirakan dibanding DPRD Kabupaten Purworejo. Dalam hal ini dari sebanyak 14 anggota dewan perempuan, paling banyak memiliki anggota dewan perempuan sebanyak 3 orang. Namun demikian, dari sepuluh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Kebumen tidak semua memiliki anggota di atas dewan perempuan, yaitu PKB, PPP, dan Hanura. Meskipun menjadi potret keterwakilan politik perempuan di lembaga legislative daerah karena hampir mencapai minimal kuota 30%, namun belum semua partai politik yang memiliki anggota dewan perempuan. Selengkapnya rincian tersebut dapat dilihat dalam tabel di atas.

Dilihat dari peluangnya, data dalam tabel 4 di atas memperlihatkan adanya perbedaan gender yang ada, yaitu bahwa peluang perempuan untuk terpilih sebagai anggota legislatif yang sangat rendah. Di Kabupaten Purworejo dari 130 caleg perempuan yang ada hanya 8, artinya 16 caleg hanya 1 peluang jadinya; sementara pada laki-laki setiap 6 caleg 1 orang berpeluang jadi. Di Kabupaten Kebumen peluang caleg perempuan lebih besar untuk jadi yaitu 1 di antara 10 orang.

Sementara partisipasi politik perempuan sebagai pemilih adalah sangat tinggi, yaitu seimbang antara laki-laki dan perempuan sebagaimana terlihat dalam tabel 5 di bawah. Ini artinya bahwa perempuan sering menjadi "korban" untuk mobilisasi masa dengan segala berbagai "rayuan" dari para calon legislatif atau calon kepala daerah/negara. Meskipun

partisipasi politik sebagai pemilih juga penting, namun perempuan kurang memiliki peran yang strategis dalam proses pengambilan keputusan.

Tabel 5. Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pilpres Tahun 2014 di Kabupaten Kebumen dan Purworejo Berdasarkan Jenis Kelaminnya

Wilayah	Lk	%	Pr	%	Lk + Pr	%
Kebumen	521.086	50,28	515.367	49,72	1.036.453	100,00
Purworejo	310.580	49,31	319.217	50,69	629.797	100,00
Jawa Tengah	13.613.862	49,71	13.771.355	50,29	27.385.217	100,00

Sumber : KPU Jawa Tengah yang diolah kembali

Meskipun secara kuantitatif partisipasi politik perempuan rendah, namun sejarah mencatat, Kabupaten Kebumen pernah memiliki Bupati perempuan, yakni Ibu Rustiningsih, yang menjabat dua periode yaitu tahun 2000-2005, dan tahun 2005-2008 yang berlanjut menjadi wakil gubernur Jawa Tengah Tahun 2008-2013. Sementara Purworejo kepemimpinan perempuan tertinggi saat ini adalah sebagai wakil bupati.

KESIMPULAN

Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa walaupun Purworejo dan Kebumen berada dalam kultur yang relatif sama yaitu Jawa Bagelen, namun kondisi sosial ekonomi antar kedua wilayah tersebut relatif berbeda. Kabupaten Kebumen dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di lingkup Jawa Tengah, namun secara kuantitas memiliki tingkat partisipasi politik perempuan yang cukup tinggi baik secara regional maupun nasional. Hal ini menjadi sebuah kajian menarik mengingat partisipasi politik perempuan yakni perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif secara global juga rendah, Indonesia 19,80 persen, Asean 18,20 persen, Asia 19,70 persen, dan dunia 23,60 persen. Secara kualitatif Kebumen juga pernah memiliki kepala daerah perempuan yang berhasil naik jenjang kariernya sampai ke level provinsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Melalui kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang dalam kepada pihak Kemenristekdikti dan LPPM Unsoed yang telah membiayai dan memfasilitasi penelitian ini melalui skim Penelitian Hibah Kompetensi Tahun Anggaran 2018. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada mitra penelitian, kepada para nara

sumber serta semua pihak yang telah membantu proses penelitian ini dari awal hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Tadjuddin Noer, 1993. *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Indonesia, 2016. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016*, Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Kabupaten Kebumen, 2018. *Kebumen dalam Angka 2018* (No. Katalog 1102001.3305), Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, Kebumen.
- Kabupaten Purworejo, 2018. *Purworejo dalam Angka 2018* (No. Katalog 1102001.3306), Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, Purworejo
- Koentjaraningrat, 1984. *Kebudayaan Jawa*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Lestari, Soetji; Sofa Marwah, Oktafiani Catur P., 2017. *Potret Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2015*, makalah dalam Prosiding Seminar Nasional dan Call Paper “
- Mukarom, Zaenal, 2008. *Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif* dalam Jurnal Mediator Vol. 9 No. 2 Desember 2008 (<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/viewFile/1125/681>)
- Nasikun, 1990. “Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan: Teori dan Implikasi” dalam *Jurnal Penelitian dan Kebijakan Kependudukan POPULASI 1 (1)*, PPK UGM, Yogyakarta.
- Provinsi Jawa Tengah, 2016. *Profil Penduduk Jawa Tengah Hasil SUPAS 2015* (No. Katalog 2101033.33), Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Semarang.
- UNDP. 2016. *Human Development Report 2015 – Work for Human Development*. http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf diakses pada 2 November 2017 jam 08.02

<http://jateng.kpu.go.id/data-pemilu/>

<https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belum-pernah-tercapai-cv8q>